

## ABSTRAKSI

Supaya pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka membiayai pembangunan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi tersebut berasal dari dana transfer pemerintah yang berasal dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Permasalahannya adalah alokasi pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam belanja langsung masih relatif kecil. Penelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pemerintah di berbagai bidang terhadap jumlah pengangguran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran. Alat analisis penelitian ini digunakan analisis regresi dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Penggunaan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di berbagai sektor terhadap jumlah pengangguran. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Sekda Jawa Tengah dari tahun 2005 – 2007.

Hasil analisis dengan menggunakan LSDV diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan transportasi berhubungan negatif terhadap jumlah pengangguran di Jawa Tengah. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pertanian, dan transportasi signifikan terhadap jumlah pengangguran, sementara variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran.

Kata-kata Kunci : Pengeluaran pemerintah, pengangguran, otonomi daerah, LSDV